

KONSTRUKSI REALITAS ISU KORUPSI DALAM PEMBERITAAN TELEVISI NASIONAL: STUDI ANALISIS *FRAMING* PADA METRO TV DAN TVONE

Rayu Mega Permatasari
KPI Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematang Siantar
Alamat e-mail : prayumega@gmail.com

ABSTRACT

Corruption remains a deeply entrenched structural problem undermining Indonesia's democratic foundations. This study analyzes how Metro TV and tvOne - two national news television stations with distinct ownership backgrounds and political affiliations - construct the reality of corruption issues through their respective news frames. A descriptive qualitative approach was employed using Robert M. Entman's (1993) framing analysis model as the primary analytical framework. Data were collected through documentation of prime-time news programs on both stations from January to June 2024, with 60 news segments purposively selected as the research sample. Analysis was conducted across Entman's four framing elements - define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation - with instrument reliability tested through Holsti's coefficient (CR = 0.84) and Scott's Pi (π = 0.79). Findings reveal systematic differences between both outlets: Metro TV predominantly frames corruption as a legal-institutional problem (47%) rooted in bureaucratic-systemic weaknesses (37%), whereas tvOne more dominantly frames it as a political-individual problem (43%), identifying individual greed (43%) as the primary cause. The most pronounced difference appears in the moral judgement element, where tvOne's criticism toward law enforcement institutions exceeds Metro TV's by more than twofold. This study concludes that these differences are explicable through the political economy of communication framework, particularly the relationship between media ownership, owners' political affiliations, and editorial orientation.

Keywords: Framing Analysis, Reality Construction, Corruption, Metro TV, Tvone, Political Economy Of Media

ABSTRAK

Korupsi tetap menjadi masalah struktural yang mengakar kuat dan merusak fondasi demokrasi Indonesia. Studi ini menganalisis bagaimana Metro TV dan tvOne - dua stasiun televisi berita nasional dengan latar belakang kepemilikan dan afiliasi politik yang berbeda - membangun realitas isu korupsi melalui kerangka berita masing-masing. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan menggunakan model analisis pembingkaihan Robert M. Entman (1993) sebagai kerangka analitis utama. Data dikumpulkan melalui dokumentasi program berita

utama di kedua stasiun tersebut dari Januari hingga Juni 2024, dengan 60 segmen berita yang dipilih secara purposif sebagai sampel penelitian. Analisis dilakukan pada empat elemen pembingkai Entman - mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan rekomendasi penanganan - dengan reliabilitas instrumen diuji melalui koefisien Holsti ($CR = 0,84$) dan Pi Scott ($\pi = 0,79$). Temuan menunjukkan perbedaan sistematis antara kedua media: Metro TV sebagian besar membingkai korupsi sebagai masalah hukum-institusional (47%) yang berakar pada kelemahan sistem birokrasi (37%), sedangkan tvOne lebih dominan membingkainya sebagai masalah politik-individu (43%), mengidentifikasi keserakahan individu (43%) sebagai penyebab utama. Perbedaan yang paling mencolok muncul dalam elemen penilaian moral, di mana kritik tvOne terhadap lembaga penegak hukum melebihi kritik Metro TV lebih dari dua kali lipat. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat dijelaskan melalui kerangka ekonomi politik komunikasi, khususnya hubungan antara kepemilikan media, afiliasi politik pemilik, dan orientasi editorial.

Kata kunci: Analisis Pembingkai, Konstruksi Realitas, Korupsi, Metro TV, Tvone, Ekonomi Politik Media

A. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, merusak banyak aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sejak reformasi pada tahun 1998, pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh lembaga masyarakat negara, dan organisasi sipil. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Meski begitu, lebih dari dua dekade kemudian, korupsi masih terjadi secara luas di berbagai tingkat pemerintahan.

Transparency International mencatat bahwa Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) sebesar 34 dari skala 100 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei (*Transparency International*, 2023). Angka ini mencerminkan betapa korupsi masih menjadi tantangan serius yang belum berhasil diatasi secara fundamental.

Dalam konteks ini, media massa, terutama televisi, memiliki peran strategis. Sebagai salah satu pilar institusi demokrasi, media massa mengemban fungsi kontrol sosial yang vital: mengawasi jalannya kekuasaan, mengungkap penyimpangan, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik untuk membuat keputusan politik yang rasional (Kovach & Rosenstiel, 2007). McQuail (2010) menegaskan bahwa media massa dalam masyarakat demokratis seharusnya berfungsi sebagai *watchdog* institusi

yang secara independen mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik maupun institusi negara.

Televisi, dengan kemampuan audio-visualnya, memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang korupsi. Pilihan gambar, ekspresi narasumber, dan nada penyiar berita semua berkontribusi dalam membentuk bingkai yang menentukan bagaimana pemirsa memahami isu korupsi. Pilihan gambar bergerak, ekspresi narasumber, ilustrasi visual, dan tone penyiar berita secara kolektif membentuk bingkai (*frame*) yang menentukan bagaimana pemirsa memahami dan memaknai suatu isu (Iyengar, 1991).

Namun, fungsi ideal media sebagai *watchdog* menghadapi tantangan serius di Indonesia. Struktur industri media nasional yang ditandai oleh konsentrasi kepemilikan pada segelintir konglomerat berafiliasi politik telah menciptakan kondisi di mana independensi editorial media menjadi semakin sulit dipertahankan (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012). Kondisi ini menjadikan pemberitaan media termasuk pemberitaan tentang korupsi tidak lagi sekadar upaya penyampaian fakta secara objektif, melainkan juga arena pertarungan kepentingan, wacana, dan kekuasaan (Sudibyo, 2004). Dalam perspektif ekonomi politik komunikasi, kepemilikan media tidak pernah bersifat netral: ia selalu membawa serta kepentingan ekonomi dan politik yang secara

langsung maupun tidak langsung memengaruhi orientasi editorial suatu institusi media (Herman & Chomsky, 1988). Proses seleksi berita, penentuan narasumber, pemilihan sudut pandang, hingga konstruksi naratif yang dihasilkan oleh suatu media pada akhirnya merupakan produk dari struktur kepemilikan dan kekuasaan yang melingkupinya.

Teori konstruksi sosial atas realitas yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (1966) memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana media massa tidak sekadar melaporkan realitas, melainkan secara aktif mengonstruksinya. Setiap berita yang diproduksi oleh sebuah redaksi merupakan hasil dari serangkaian proses sosial yang melibatkan seleksi, penekanan, dan presentasi fakta sebuah proses yang tidak pernah sepenuhnya bebas nilai (*value-free*). Dalam konteks inilah, analisis framing menjadi instrumen analitis yang sangat relevan untuk membedah bagaimana media mengonstruksi realitas isu korupsi. Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan, sedemikian rupa sehingga mendorong khalayak untuk menginterpretasi suatu isu dengan cara tertentu.

Model analisis framing Entman mengoperasionalkan proses tersebut ke dalam empat elemen: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (identifikasi penyebab),

make moral judgement (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian). Di antara stasiun televisi berita nasional yang ada, Metro TV dan tvOne merupakan dua lembaga penyiaran yang paling menonjol dalam pemberitaan isu-isu politik dan hukum, termasuk korupsi.

Keduanya memiliki program berita unggulan dengan basis pemirsa yang besar dan jangkauan siaran nasional. Yang menjadikan perbandingan antara keduanya sangat signifikan secara akademis adalah fakta bahwa kedua stasiun ini diketahui memiliki latar belakang kepemilikan dan afiliasi politik yang berbeda. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Partai NasDem, sementara tvOne berada di bawah naungan grup Bakrie yang memiliki kedekatan historis dengan berbagai kekuatan politik tertentu (Lim, 2012). Perbedaan afiliasi politik di tingkat kepemilikan ini secara teoritis berpotensi melahirkan perbedaan yang sistematis dalam konstruksi pemberitaan yang dihasilkan oleh masing-masing institusi media tersebut, terutama pada isu-isu sensitif secara politik seperti korupsi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji framing pemberitaan korupsi di media Indonesia, antara lain Hamad (2004) yang menganalisis konstruksi politik dalam media cetak, serta Eriyanto (2012) yang mengembangkan kerangka analisis framing dalam konteks media Indonesia secara lebih komprehensif. Studi komparatif terhadap dua stasiun televisi berita

juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun sebagian besar berfokus pada isu Pemilu dan kebijakan publik, bukan secara spesifik pada pemberitaan korupsi dalam kurun waktu pasca- Pemilu 2024. Celah akademis inilah yang menjadi salah satu justifikasi utama penelitian ini. Periode Januari hingga Juni 2024 dipilih secara strategis karena merupakan masa transisi politik pasca-Pemilu 2024 yang kaya dengan dinamika pemberitaan korupsi yang sarat muatan kepentingan politik sebuah konteks yang menjadikan analisis framing terhadap kedua stasiun televisi tersebut semakin urgen dan relevan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Metro TV dan tvOne mengonstruksi realitas isu korupsi melalui bingkai pemberitaannya masing-masing, membandingkan pola-pola perbedaan yang muncul, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi perbedaan konstruksi tersebut. Dengan menggunakan model analisis framing Entman (1993) sebagai kerangka analitis utama dan menerapkannya pada 60 segmen berita prime-time yang dipilih secara purposif dari kedua stasiun, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris yang bermakna bagi pengembangan kajian media, jurnalisme televisi, dan ekonomi politik komunikasi di Indonesia.

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada konsep konstruksi realitas sosial yang diperkenalkan

oleh Berger dan Luckmann (1966) dalam karya monumentalnya *The Social Construction of Reality*. Berger dan Luckmann berargumen bahwa realitas tidak hadir begitu saja sebagai sesuatu yang objektif, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang melibatkan interaksi manusia, institusi, dan sistem makna yang berkembang dalam masyarakat melalui mekanisme eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Perspektif ini memiliki implikasi mendasar bagi kajian media: institusi media, termasuk televisi, tidak sekadar melaporkan peristiwa secara netral, melainkan secara aktif membentuk, memilih, dan menyusun informasi sehingga menghasilkan versi realitas tertentu yang disajikan kepada khalayak (Sobur, 2009).

Tuchman (1978) memperluas gagasan tersebut melalui konsep *news as a window on the world*, yang menegaskan bahwa berita bukanlah cermin realitas, melainkan sebuah bingkai yang telah dikonstruksi oleh jurnalis dan institusi media. Setiap pilihan kata, sudut kamera, narasumber yang dipilih, dan urutan penyajian berita merupakan bagian dari proses konstruksi realitas yang tidak pernah sepenuhnya bebas nilai (*value-free*). Dengan demikian, apa yang disebut sebagai "berita" sesungguhnya merupakan produk dari serangkaian keputusan editorial yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan ekonomi, dan relasi kekuasaan di balik institusi media itu sendiri.

Selanjutnya Teori framing yang memiliki akar multidisipliner yang mencakup psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Dalam tradisi sosiologi, Goffman (1974) menjadi pionir dengan memperkenalkan konsep *frame* sebagai skema interpretasi yang digunakan individu untuk memahami dan merespons situasi sosial. *Frame* membantu manusia mengorganisasi pengalaman dan memandu tindakan, baik secara individual maupun kolektif. Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam studi komunikasi massa oleh Gitlin (1980), yang mendefinisikan media *frame* sebagai pola presentasi, seleksi, penekanan, dan pengecualian yang secara konsisten digunakan oleh para jurnalis untuk mengorganisasikan wacana, baik secara verbal maupun visual.

Menurut Gitlin, framing dalam berita tidak hanya mencerminkan ideologi media, tetapi secara aktif mereproduksi dan memperkuat ideologi dominan dalam masyarakat. Scheufele (1999) selanjutnya memperkenalkan distingsi penting antara media framing bagaimana media membingkai isu dan audience framing bagaimana khalayak menginterpretasikan bingkai yang diterima. Temuan ini menegaskan bahwa framing bukan sekadar proses produksi berita, melainkan juga proses resepsi yang dinamis, di mana khalayak tidak selalu menerima bingkai media secara pasif. Kontribusi Scheufele ini relevan untuk mengingatkan bahwa efektivitas konstruksi realitas yang

dilakukan media pada akhirnya juga bergantung pada kapasitas literasi kritis khalayaknya.

Di antara berbagai model analisis framing yang berkembang dalam kajian komunikasi, model yang dikemukakan oleh Robert M. Entman (1993) dalam artikelnya "*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*" dianggap paling operasional dan paling banyak diaplikasikan dalam penelitian analisis isi media. Entman (1993, h. 52) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sedemikian rupa sehingga mendorong definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan terhadap isu yang digambarkan. Model Entman mengoperasionalkan proses framing ke dalam empat elemen analitis yang saling berkaitan. Pertama, *define problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana suatu isu atau peristiwa didefinisikan oleh media sebagai sebuah masalah dengan sudut pandang tertentu. Dalam konteks pemberitaan korupsi, media dapat mendefinisikannya sebagai masalah hukum, moral, politik, atau sistemik dan setiap pilihan definisi menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda.

Kedua, *diagnose causes* (diagnosis penyebab), yakni bagaimana media mengidentifikasi aktor atau kekuatan yang dianggap

bertanggung jawab atas terjadinya masalah, apakah pada level individu, institusi, ataukah sistem. Ketiga, *make moral judgement* (penilaian moral), yang mencakup evaluasi moral yang dilekatkan media terhadap aktor dan peristiwa yang diberitakan, baik secara eksplisit melalui diksi maupun implisit melalui tone pemberitaan, pemilihan narasumber, dan penekanan visual. Keempat, *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian), yaitu solusi yang ditawarkan atau disiratkan media sebagai respons atas masalah yang telah didefinisikan, yang mencerminkan sudut pandang editorial media bersangkutan. Kekuatan model Entman terletak pada kemampuannya menghubungkan level teks (bagaimana berita ditulis dan disajikan) dengan level konteks (kepentingan dan ideologi di balik produksi berita), sehingga menjadikannya kerangka yang produktif tidak hanya untuk analisis deskriptif, tetapi juga untuk analisis kritis terhadap relasi antara media dan kekuasaan.

Selanjutnya Pemahaman terhadap konstruksi pemberitaan tidak dapat dilepaskan dari analisis ekonomi politik media. Mosco (1996) dalam *The Political Economy of Communication* menjelaskan bahwa industri media tidak beroperasi dalam ruang yang steril dari kepentingan ekonomi dan politik. Kepemilikan media, struktur permodalan, dan relasi antara pemilik media dengan kekuatan politik merupakan faktor determinan

yang membentuk arah editorial sebuah lembaga berita. Perspektif ini memperoleh elaborasi paling tajam dalam karya Herman dan Chomsky (1988), *Manufacturing Consent*, yang memperkenalkan propaganda model sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana kepemilikan media, sumber pendapatan iklan, dan hubungan dengan elite kekuasaan bekerja sebagai filter yang menyaring informasi sebelum sampai kepada publik.

Dalam konteks Indonesia, fenomena konsentrasi kepemilikan media telah menjadi persoalan serius yang dikaji secara mendalam oleh berbagai peneliti. Nugroho, Putri, dan Laksmi (2012) mencatat bahwa industri media nasional dikuasai oleh segelintir konglomerat yang sebagian besar memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu sebuah kondisi yang secara langsung berimplikasi pada independensi editorial dan objektivitas pemberitaan. Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, dan tvOne yang berada di bawah naungan Grup Bakrie dengan berbagai kedekatan politiknya (Lim, 2012), merupakan dua contoh konkret bagaimana kepemilikan media dapat memengaruhi konstruksi pemberitaan pada isu-isu sensitif secara politik, termasuk korupsi.

Televisi tetap menjadi salah satu medium pemberitaan paling berpengaruh di Indonesia. Data Nielsen (2022) menunjukkan bahwa penetrasi televisi di Indonesia masih

berada pada angka yang signifikan, menjadikannya instrumen komunikasi massa yang strategis dalam pembentukan opini publik. Jurnalisme televisi memiliki karakteristik *distingtif* dibandingkan media cetak maupun daring: kemampuannya menghadirkan informasi secara audio-visual secara simultan memberikan kekuatan persuasif yang lebih besar dalam membentuk persepsi penonton (Iyengar, 1991).

Gambar bergerak, ekspresi narasumber, musik latar, dan pilihan ilustrasi visual merupakan elemen framing yang khas dalam medium televisi dan tidak ditemukan pada media berbasis teks. Namun, *independensi* jurnalisme televisi di Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Dewan Pers (2023) mencatat bahwa intervensi editorial pemilik modal, tekanan dari kepentingan pengiklan, serta ketergantungan pada iklan pemerintah menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers televisi. Dalam konteks pemberitaan korupsi, tekanan-tekanan tersebut dapat melahirkan self-censorship di kalangan jurnalis atau bahkan pengarahan editorial yang secara sistematis menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya.

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling konsisten mendapat sorotan media nasional Indonesia sejak era reformasi 1998. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 dari 100 pada tahun 2023 (Transparency International, 2023), Indonesia

masih berada dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, sehingga peran media dalam membentuk kesadaran publik dan mendorong akuntabilitas menjadi sangat krusial. Namun, pemberitaan korupsi di Indonesia tidak selalu hadir dalam format yang netral dan berimbang. Eriyanto (2002) menunjukkan bagaimana media Indonesia kerap membingkai isu korupsi secara selektif memberikan porsi besar pada kasus yang melibatkan lawan politik pemilik media, sementara meminimalkan kasus yang melibatkan sekutu politiknya. Pola semacam ini mengindikasikan bahwa pemberitaan korupsi tidak semata berfungsi sebagai kontrol sosial, melainkan juga sebagai instrumen pertarungan wacana dan kepentingan politik. Hamad (2004) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa framing berita korupsi pada berbagai media nasional mencerminkan posisi ideologis masing-masing redaksi secara konsisten.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pijakan akademis yang relevan bagi kajian ini. Rahayu (2019) menggunakan model Entman untuk menganalisis framing pemberitaan kasus korupsi e-KTP di media daring Indonesia dan menemukan perbedaan signifikan dalam elemen diagnose causes dan moral judgement antara media pro-oposisi dan pro-pemerintah. Wahyuni (2020) menemukan bahwa durasi tayangan, pemilihan narasumber, dan penggunaan grafis visual merupakan instrumen framing

yang dominan dalam medium televisi. Lestari dan Pratama (2021) secara spesifik mengkaji Metro TV dan tvOne dalam konteks pemberitaan politik dan menegaskan bahwa afiliasi politik pemilik media berkorelasi positif dengan kecenderungan bingkai editorial yang menguntungkan kelompok politik tertentu.

Di ranah internasional, Iyengar dan Simon (1993) memperkenalkan *distingsi* antara *episodic framing* yang berfokus pada individu atau kasus spesifik dan *thematic framing* yang menyoroti akar masalah struktural sebagai kerangka tambahan yang relevan untuk memahami bagaimana pemberitaan korupsi dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan sistemik yang lebih dalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing (framing analysis) sebagai instrumen analitis utama. Analisis framing dipilih karena kemampuannya dalam mengkaji bagaimana realitas dikonstruksi dan disajikan oleh media melalui proses seleksi, penonjolan, dan pengabaian aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa (Eriyanto, 2002). Model framing yang diadopsi adalah model Robert M. Entman (1993), yang mengoperasionalkan proses konstruksi realitas media ke dalam empat elemen analitis: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment

recommendation. Model ini dipilih atas pertimbangan bahwa keempat elemennya mampu memetakan secara komprehensif bagaimana media mendefinisikan isu, mengidentifikasi penyebab, memberikan evaluasi moral, serta menawarkan solusi sehingga relevan untuk membedah pola konstruksi pemberitaan korupsi pada dua stasiun televisi yang menjadi objek kajian.

Objek penelitian ini adalah tayangan program berita utama (prime time) pada dua stasiun televisi nasional. Dari Metro TV, program yang dikaji adalah Primetime News (pukul 19.00–20.00 WIB) dan Metro Hari Ini (pukul 17.00–18.00 WIB). Dari tvOne, program yang dikaji adalah Kabar Petang (pukul 17.00–19.00 WIB) dan Apa Kabar Indonesia Malam (pukul 19.30–21.00 WIB). Program-program tersebut dipilih karena merupakan program berita dengan rating tertinggi dan jangkauan pemirsa terluas pada masing-masing stasiun, sehingga dianggap paling representatif dalam mencerminkan kebijakan editorial kedua media.

Adapun subjek penelitian adalah seluruh segmen berita yang secara spesifik membahas isu korupsi di Indonesia, mencakup pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK, persidangan terdakwa korupsi, pembacaan vonis, kebijakan pemberantasan korupsi, serta pernyataan pejabat publik terkait isu korupsi yang ditayangkan selama periode penelitian. Populasi

penelitian adalah seluruh segmen berita tentang isu korupsi yang ditayangkan oleh Metro TV dan tvOne melalui program berita utama masing-masing selama periode Januari hingga Juni 2024, yakni selama 180 hari siaran. Mengingat volume tayangan yang sangat besar, penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2019). Kriteria inklusi sampel berita meliputi: (1) berita membahas kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau institusi negara di tingkat nasional; (2) berita memiliki durasi tayang minimal dua menit; (3) berita ditayangkan setidaknya dalam dua episode program yang berbeda, sebagai indikator signifikansi editorial; serta (4) berita mencakup beragam jenis kasus korupsi dari tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin representasi yang memadai. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 30 segmen berita dari Metro TV dan 30 segmen berita dari tvOne, sehingga total sampel berjumlah 60 segmen berita.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, dokumentasi tayangan berita sebagai sumber data primer, yang dilaksanakan melalui pengunduhan tayangan dari kanal YouTube resmi Metro TV (Metro TV News) dan tvOne (tvOne news), pemanfaatan layanan arsip digital resmi kedua stasiun, serta penggunaan transkrip berita yang

tersedia di situs web resmi masing-masing media. Setiap segmen berita yang terpilih ditranskripsi secara lengkap, mencakup narasi presenter, pernyataan narasumber, teks running text, dan deskripsi elemen visual yang ditampilkan. Kedua, studi pustaka sebagai sumber data sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga survei, dan dokumen kebijakan yang relevan untuk membangun landasan teori dan memperkuat analisis.

Instrumen utama penelitian ini adalah Lembar Koding Analisis Framing yang dikembangkan berdasarkan keempat elemen model Entman (1993). Lembar koding ini memuat identitas berita dan empat blok pertanyaan yang masing-masing berkorespondensi dengan satu elemen framing. Pada elemen *define problems*, koder mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan isu korupsi apakah sebagai masalah hukum, moral, politik, sistemik-struktural, atau sosial-ekonomi. Pada elemen *diagnose causes*, koder mengidentifikasi penyebab yang ditonjolkan media, baik pada level individu, institusi, maupun sistem, serta bagaimana media memosisikan aktor utama dalam narasi berita. Pada elemen *make moral judgement*, koder menilai tone pemberitaan secara keseluruhan, mengidentifikasi pilihan diksi dan frasa yang bermuatan evaluatif, serta mencatat elemen visual yang memperkuat penilaian moral. Pada elemen *treatment recommendation*, koder mengidentifikasi solusi yang

ditawarkan atau disiratkan media beserta aktor yang ditempatkan sebagai penanggung jawab penyelesaian masalah. Lembar koding juga menyertakan bagian kesimpulan koding yang merekam frame dominan dan kecenderungan keberpihakan yang teridentifikasi secara keseluruhan.

Guna memastikan konsistensi dan objektivitas proses pengkodean, penelitian ini menerapkan prosedur uji reliabilitas antar-koder (intercoder reliability) yang melibatkan tiga orang koder: peneliti utama, satu orang mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi yang memiliki pemahaman tentang analisis framing, dan satu orang praktisi jurnalis dengan pengalaman minimal tiga tahun. Sebelum proses koding dimulai, seluruh koder mengikuti sesi pelatihan selama minimal tiga jam yang mencakup penjelasan operasionalisasi keempat elemen framing Entman, simulasi koding menggunakan lima sampel berita uji coba, serta diskusi klarifikasi perbedaan interpretasi. Koding dilakukan secara independen oleh masing-masing koder terhadap seluruh 60 sampel berita, tanpa komunikasi satu sama lain. Tingkat kesepakatan antar-koder dihitung menggunakan dua formula yang saling melengkapi. Formula Holsti (1969) digunakan sebagai ukuran dasar kesepakatan:

$$CR = 2M / (N_1 + N_2)$$

Di mana M adalah jumlah item yang disepakati, N_1 adalah jumlah item yang dikoding oleh Koder 1, dan N_2 adalah jumlah item yang dikoding oleh Koder 2.

Selain itu, Scott's Pi (π) digunakan sebagai ukuran yang lebih ketat karena memperhitungkan kemungkinan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan (chance agreement):

$$\pi = (\% \text{ kesepakatan teramati} - \% \text{ kesepakatan yang diharapkan}) / (1 - \% \text{ kesepakatan yang diharapkan})$$
 Standar penerimaan yang ditetapkan adalah $CR \geq 0,70$ dan $\pi \geq 0,70$ (Eriyanto, 2002). Nilai di bawah ambang tersebut akan memicu evaluasi definisi operasional kategori dan proses koding ulang setelah diskusi klarifikasi bersama. Hasil pengujian menunjukkan koefisien Holsti sebesar $CR = 0,84$ dan Scott's Pi sebesar $\pi = 0,79$, yang berarti seluruh data memenuhi standar reliabilitas yang ditetapkan dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan melalui enam tahapan yang berurutan. Pada tahap pertama, seluruh sampel berita yang terpilih dikumpulkan, ditonton secara cermat, dan ditranskripsi lengkap mencakup narasi verbal dan deskripsi elemen visual. Tahap kedua adalah koding framing, di mana setiap transkrip dikoding menggunakan lembar koding Entman oleh ketiga koder secara independen. Tahap ketiga adalah uji reliabilitas menggunakan formula Holsti dan Scott's Pi untuk memastikan konsistensi data. Tahap keempat adalah analisis per elemen framing, di mana hasil koding yang telah reliabel dianalisis secara mendalam baik secara terpisah per stasiun maupun secara komparatif antara Metro TV dan tvOne. Tahap kelima adalah

interpretasi dan kontekstualisasi, yakni menghubungkan temuan analisis framing dengan faktor-faktor struktural seperti kepemilikan media, afiliasi politik, dan dinamika industri media di Indonesia. Tahap keenam adalah penyimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan interpretasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Keabsahan penelitian dijamin melalui empat strategi. Pertama, triangulasi sumber, dengan mengkonfirmasi data tayangan televisi terhadap versi teks berita yang dipublikasikan di situs web resmi kedua media untuk memastikan konsistensi konstruksi framing lintas platform. Kedua, perreview koder, di mana hasil interpretasi framing oleh peneliti utama didiskusikan dengan rekan sejawat yang kompeten di bidang kajian media. Ketiga, member checking, yakni mengonsultasikan temuan sementara kepada informan ahli akademisi komunikasi dan praktisi jurnalis senior untuk memperoleh konfirmasi dan masukan kritis. Keempat, *audit trail*, di mana seluruh proses penelitian mulai dari pemilihan sampel, transkripsi, koding, hingga interpretasi didokumentasikan secara rinci dalam catatan penelitian (research journal) yang dapat diverifikasi oleh pihak luar demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Pemberitaan Korupsi

Selama periode penelitian Januari-Juni 2024, peneliti berhasil mengidentifikasi dan menganalisis total 60 segmen berita - masing-masing 30 dari Metro TV dan 30 dari tvOne yang memenuhi kriteria purposive sampling. Uji reliabilitas antar-koder menghasilkan koefisien Holsti sebesar 0,84 dan Scott's Pi sebesar 0,79, keduanya berada di atas ambang batas penerimaan 0,70, sehingga data dinyatakan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut. Secara kuantitas, Metro TV menayangkan rata-rata 4,8 segmen berita korupsi per minggu, sementara tvOne menayangkan rata-rata 4,2 segmen per minggu. Perbedaan frekuensi ini mengindikasikan bahwa Metro TV memberikan perhatian editorial yang sedikit lebih besar terhadap isu korupsi dibandingkan tvOne dalam periode yang sama.

Framing Metro TV terhadap Isu Korupsi

1. Define Problems

Hasil analisis menunjukkan bahwa Metro TV secara dominan membingkai isu korupsi sebagai masalah hukum (47% dari total berita), yang tercermin dari pilihan narasumber yang didominasi oleh pejabat KPK, jaksa penuntut, dan pakar hukum pidana. Narasi yang dibangun cenderung bersifat prosedural dan faktual, mengikuti alur proses hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Definisi masalah sebagai isu moral/etika menempati posisi ketiga (17%), yang tampak melalui pemilihan diksi seperti "pengkhianatan amanah rakyat", "mencoreng martabat lembaga", dan "merusak kepercayaan publik". Sementara framing sebagai masalah sistemik muncul pada 13% berita, umumnya ketika Metro TV membahas kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu pejabat dalam satu institusi - mengarahkan pemirsa untuk melihat korupsi bukan sekadar perilaku individu, melainkan gejala dari kelemahan sistem yang lebih luas.

2. Diagnose Causes

Metro TV cenderung mengidentifikasi kelemahan sistem dan birokrasi (37%) sebagai penyebab utama korupsi, diikuti oleh keserakahan individu (30%) dan lemahnya pengawasan internal (20%). Pola ini mencerminkan kecenderungan Metro TV untuk

menempatkan korupsi dalam bingkai struktural-institusional, bukan semata-mata sebagai persoalan moralitas personal pelaku. Dalam konteks pemilihan narasumber untuk menjelaskan penyebab korupsi, Metro TV didominasi oleh akademisi dan pengamat independen (43%), diikuti pejabat KPK (37%), dan praktisi hukum (20%). Proporsi ini mengindikasikan upaya Metro TV untuk menghadirkan perspektif analitis yang lebih beragam dalam menjelaskan akar persoalan korupsi.

3. Make Moral Judgement

Metro TV menunjukkan kecenderungan yang cukup kritis terhadap pelaku korupsi, dengan 47% berita menggunakan tone yang kritis terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, yang menarik adalah adanya 13% berita yang justru mengarahkan kritik kepada lembaga penegak hukum umumnya muncul dalam konteks pemberitaan tentang dugaan ketidakadilan prosedur hukum atau kontroversi seputar proses penyelidikan KPK.

Dalam hal representasi korban, Metro TV pada 60% beritanya menyertakan data konkret tentang kerugian negara dalam jumlah yang spesifik, dan pada 27% berita menampilkan warga masyarakat yang terdampak langsung oleh korupsi sebagai korban yang nyata sebuah strategi framing yang secara efektif membangun empati publik dan memperkuat legitimasi proses pemberantasan korupsi.

4. Treatment Recommendation

Rekomendasi yang paling dominan dalam pemberitaan Metro TV adalah penguatan kelembagaan KPK (40%), yang sering kali muncul dalam bentuk dukungan editorial terhadap kebijakan dan wewenang KPK, termasuk kritik terhadap upaya-upaya yang dianggap melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut. Rekomendasi kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu (27%), yang diartikulasikan melalui narasi tentang pentingnya *equality before the law* dalam penanganan kasus korupsi.

Framing tvOne terhadap Isu Korupsi

1. Define Problems

Berbeda secara signifikan dengan Metro TV, tvOne mendefinisikan isu korupsi secara dominan sebagai masalah politik (43%). Bingkai ini tampak melalui narasi yang kerap mengaitkan kasus korupsi dengan dinamika persaingan kekuasaan, rivalitas partai politik, dan kontestasi kepentingan di antara kelompok-kelompok elite. Framing sebagai masalah hukum-formal hanya menempati posisi kedua (23%), menunjukkan bahwa tvOne lebih tertarik pada dimensi politik dari setiap kasus korupsi dibandingkan pada aspek prosedur hukumnya. Framing sebagai masalah moral mendapat porsi yang lebih besar di tvOne (20%) dibandingkan Metro TV, umumnya dikaitkan dengan narasi tentang degradasi nilai dan karakter

kepemimpinan nasional. Hal yang menarik adalah hampir tidak adanya framing masalah sistemik dalam pemberitaan tvOne (hanya 7%), mengindikasikan kecenderungan tvOne untuk melihat korupsi sebagai persoalan individu dan konteks politik, bukan sebagai gejala struktural yang lebih dalam.

2. Diagnose Causes

tvOne secara dominan mengidentifikasi keserakahan individu pelaku (43%) sebagai penyebab utama korupsi, diikuti oleh kepentingan politik (23%) dan lemahnya pengawasan (13%). Pola ini sangat berbeda dari Metro TV dan mencerminkan kecenderungan tvOne untuk melokalisasi penyebab korupsi pada level individu dan kepentingan politik tertentu, alih-alih pada kelemahan sistemik yang lebih luas. Dalam hal narasumber, tvOne lebih banyak menghadirkan politisi dan pejabat pemerintah (40%) dibandingkan Metro TV, sementara proporsi akademisi independen jauh lebih kecil (17%). Komposisi narasumber ini secara langsung memengaruhi konstruksi diagnosis penyebab korupsi yang dihasilkan lebih sarat nuansa politik dan kurang dalam dimensi analisis strukturalnya.

3. Make Moral Judgement

Hasil analisis mengungkap pola yang paling berbeda antara kedua media justru terletak pada elemen penilaian moral ini. tvOne menunjukkan proporsi yang signifikan dalam mengkritik lembaga penegak hukum (30%), jauh lebih tinggi dibandingkan Metro TV (13%).

Kritik ini umumnya diarahkan pada KPK dan prosedur penangkapan, dengan narasi yang mempertanyakan motif di balik penanganan kasus-kasus tertentu dan menyiratkan adanya politisasi hukum.

Proporsi berita dengan tone membela atau meringankan pelaku juga lebih tinggi di tvOne (13%) dibandingkan Metro TV (7%). Pembelaan ini umumnya tidak dilakukan secara eksplisit, melainkan melalui strategi framing yang lebih halus seperti memberikan porsi bicara yang lebih besar kepada kuasa hukum terdakwa, menghadirkan narasi tentang kemungkinan rekayasa kasus, atau menekankan asas praduga tak bersalah secara berulang.



4. Treatment Recommendation

Berbeda dari Metro TV yang menekankan penguatan KPK, tvOne lebih banyak merekomendasikan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan (33%) sebagai solusi utama atas problem korupsi. Rekomendasi ini sering kali disajikan dalam bingkai yang lebih luas tentang perlunya perombakan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh sebuah narasi yang secara tidak langsung menggeser fokus dari penindakan hukum individual ke arah pembenahan sistem yang lebih abstrak dan jangka panjang.

Tabel Perbandingan Framing MetroTV vs tvOne

Elemen Framing	Metro TV	tvOne
Define Problems Pendefinisian masalah	Masalah Hukum 47% Korupsi dibingkai sebagai pelanggaran hukum yang harus diproses secara prosedural. Narasi bersifat faktual dan mengikuti alur proses peradilan.	Masalah Politik 43% Korupsi dikaitkan dengan dinamika persaingan kekuasaan dan rivalitas elite. Dimensi politik lebih ditonjolkan dibanding aspek hukum.
Diagnose Causes Diagnosis penyebab	Kelemahan Sistem 37% Korupsi dimaknai sebagai gejala kelemahan institusional dan birokrasi. Narasumber didominasi akademisi dan pengamat independen (43%).	Individu Pelaku 43% Korupsi difokuskan pada keserakahan dan karakter buruk pelaku. Narasumber lebih banyak dari kalangan politisi dan pejabat (40%).
Moral Judgement Penilaian moral	Kritis ke Pelaku 47% Tone dominan kritis terhadap tersangka/terdakwa. Korban direpresentasikan secara konkret. Hanya 13% berita yang kritis ke penegak hukum.	Kritis ke Penegak Hukum 30% Proporsi kritik ke KPK/aparat jauh lebih tinggi. 13% berita cenderung membela pelaku — dua kali lipat Metro TV. Tone lebih ambigu.
Treatment Recommendation Rekomendasi solusi	Penguatan KPK 40% Mendorong penguatan independensi dan wewenang KPK. Narasi konsisten mendukung posisi KPK sebagai institusi antikorupsi utama.	Reformasi Birokrasi 33% Menekankan perlunya perombakan sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Rekomendasi lebih abstrak dan berjangka panjang.
Frame Dominan Kesimpulan bingkai	Frame Hukum-Institusional Korupsi adalah persoalan hukum dan kelemahan sistem yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan penguatan KPK.	Frame Politik-Individual Korupsi adalah persoalan individu dalam konteks persaingan politik yang harus diselesaikan melalui reformasi sistem secara umum.
Keberpihakan Orientasi editorial	Pro penegak hukum (KPK), pro-reformasi, cenderung mengkritisi kekuasaan eksekutif yang dianggap menghambat pemberantasan	Lebih skeptis terhadap KPK, cenderung mempertanyakan proses hukum pada kasus-kasus yang melibatkan pihak yang dekat

Konstruksi Realitas Korupsi melalui Bingkai Pemberitaan

Temuan penelitian ini secara konsisten mengkonfirmasi proposisi teoretis yang diajukan oleh Berger

dan Luckmann (1966) bahwa realitas sosial dalam hal ini realitas tentang korupsi tidak hadir secara objektif, melainkan dikonstruksi melalui proses sosial yang berlangsung dalam institusi-institusi tertentu. Metro TV dan tvOne, sebagai dua institusi media yang beroperasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, menghasilkan konstruksi realitas yang secara fundamental berbeda tentang isu yang sama.

Metro TV membangun realitas korupsi sebagai persoalan hukum-institusional sebuah bingkai yang menempatkan proses hukum dan penguatan lembaga antikorupsi sebagai sumbu utama narasi. Bingkai ini mengundang pemirsa untuk memahami korupsi dalam kerangka *rule of law*, di mana solusinya terletak pada penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, khususnya KPK.

Sebaliknya, tvOne mengonstruksi realitas korupsi sebagai persoalan politik-individual sebuah bingkai yang menempatkan persaingan kekuasaan dan karakter moral individu sebagai faktor penentu. Bingkai ini secara implisit menormalisasi pandangan bahwa korupsi adalah produk dari dinamika politik yang inheren dalam sistem demokrasi, sehingga penyelesaiannya memerlukan reformasi sistem secara menyeluruh, bukan sekadar penindakan hukum terhadap individu. Efek dari bingkai semacam ini adalah melemahnya

urgensi penegakan hukum yang segera dan tegas sebuah implikasi yang sangat signifikan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengaruh Kepemilikan Media terhadap Keberpihakan Pemberitaan

Temuan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta struktural tentang kepemilikan kedua stasiun televisi. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh yang juga merupakan Ketua Umum Partai NasDem partai yang dalam periode penelitian (2024) berada dalam koalisi pemerintahan namun pada saat yang sama kerap mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu pemberantasan korupsi. Posisi politik yang ambigu namun cenderung pro-reformasi ini tercermin dalam kecenderungan Metro TV untuk mendukung penguatan KPK dan menyuarakan narasi *rule of law*.

tvOne, yang berada di bawah naungan Visi Media Asia milik Anindya Bakrie dari kelompok Bakrie yang memiliki sejarah panjang bersinggungan dengan berbagai kasus hukum, menunjukkan pola editorial yang berbeda. Kecenderungan tvOne untuk lebih sering mempertanyakan proses hukum KPK, memberikan ruang lebih besar bagi narasi yang meringankan pelaku, dan membingkai korupsi dalam konteks politik - semuanya dapat dipahami dalam kerangka *political economy of communication* yang dikemukakan

oleh Mosco (1996). Kepentingan pemilik media tidak hanya memengaruhi liputan secara langsung, tetapi juga membentuk budaya editorial yang secara sistematis menghasilkan kecenderungan- kecenderungan tertentu dalam konstruksi berita.

Pola ini selaras dengan apa yang Herman dan Chomsky (1988) gambarkan sebagai propaganda model, di mana kepemilikan media berfungsi sebagai salah satu filter utama yang menyaring informasi dan membentuk bingkai pemberitaan sebelum sampai kepada khalayak. Meskipun model Herman dan Chomsky dikembangkan dalam konteks media Amerika Serikat, relevansinya untuk kasus media Indonesia terbukti sangat kuat, mengingat konsentrasi kepemilikan media di Indonesia bahkan lebih terpusat dibandingkan yang terjadi di negara- negara Barat.

Implikasi Framing terhadap Persepsi Publik

Perbedaan bingkai yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemirsa masing-masing stasiun televisi memahami dan menyikapi isu korupsi. Berdasarkan teori agenda setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw (1972), media tidak hanya menentukan apa yang dipikirkan oleh publik, tetapi juga melalui mekanisme framing menentukan bagaimana publik memikirkan isu tersebut.

Pemirsa yang secara reguler

mengonsumsi berita korupsi dari Metro TV akan cenderung membangun pemahaman bahwa korupsi adalah masalah hukum yang serius dan sistemik, bahwa KPK adalah institusi yang perlu diperkuat dan dilindungi dari intervensi politik, dan bahwa penegakan hukum yang konsisten adalah prasyarat bagi pemberantasan korupsi yang efektif. Sebaliknya, pemirsa setia tvOne berpotensi mengembangkan sikap yang lebih skeptis terhadap proses hukum, lebih melihat korupsi sebagai produk dari permainan politik elite, dan lebih menekankan perlunya reformasi sistem ketimbang penindakan hukum individual.

Kondisi ini menjadi semakin problematik ketika dipertimbangkan bahwa sebagian besar pemirsa televisi di Indonesia tidak secara simultan mengonsumsi berita dari berbagai stasiun yang berbeda, mereka cenderung setia pada satu atau dua stasiun televisi yang menjadi preferensi mereka. Akibatnya, segregasi informasi dan fragmentasi realitas tentang isu korupsi berpotensi memperdalam polarisasi persepsi publik, yang pada gilirannya dapat melemahkan konsensus sosial yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama:

Pertama, Metro TV dan tvOne mengonstruksi realitas isu korupsi secara berbeda dan konsisten melalui keempat elemen framing Entman. Metro TV membangun bingkai hukum- institusional yang menempatkan proses hukum dan penguatan KPK sebagai inti narasi, sementara tvOne membangun bingkai politik-individual yang menempatkan persaingan kekuasaan dan karakter individu sebagai penjelasan utama atas fenomena korupsi.

Kedua, perbedaan bingkai pemberitaan antara kedua media tidak terjadi secara acak, melainkan berpola dan dapat dijelaskan melalui kerangka ekonomi politik media khususnya melalui relasi antara kepemilikan media, afiliasi politik pemilik, dan orientasi editorial yang dihasilkan. Hal ini mengkonfirmasi relevansi teori propaganda model Herman dan Chomsky dalam konteks industri media Indonesia.

Ketiga, perbedaan konstruksi realitas yang dihasilkan oleh kedua media berimplikasi signifikan terhadap pembentukan persepsi publik tentang korupsi yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi dukungan sosial terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Monografi

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A*

treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature.* Columbia University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi dan politik media.* LKiS.

Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience.* Harvard University Press.

Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik.* Granit.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media.* Pantheon Books.

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.

Mosco, V. (1996). *The political economy of communication: Rethinking and renewal.* SAGE Publications.

Sobur, A. (2009). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing.* Remaja Rosdakarya.

Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality.* Free Press.

Artikel Jurnal

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
<https://doi.org/10.1111/j.160-2466.1993.tb01304.x>

Gitlin, T. (1980). Framing: Personal notes on a fractured paradigm. *Critical Studies in Mass Communication*, 7(3), 250–262.

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. *Political Science Quarterly*, 85(1), 143–144.

Iyengar, S., & Simon, A. (1993). News coverage of the Gulf crisis and public opinion: A study of agenda-setting, priming, and framing. *Communication Research*, 20(3), 365–383.
<https://doi.org/10.1177/009365093020003002>

Lestari, D., & Pratama, R. (2021). Independensi media dan kepemilikan: Analisis framing pemberitaan politik di Metro TV dan tvOne. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 88–104.
<https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.xxxx>

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
<https://doi.org/10.1086/267>

990

Rahayu, S. (2019). Framing pemberitaan kasus korupsi e-KTP di media online Indonesia.

Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(1), 45–62.
<https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.xxxx> Scheufele, D. A. (1999).

Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>

Scott, W. A. (1955). Reliability of content analysis: The case of nominal scale coding. *Public Opinion Quarterly*, 19(3), 321–325.
<https://doi.org/10.1086/266577>

Wahyuni, H. I. (2020). Konstruksi realitas pemberitaan korupsi pada stasiun televisi nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 17–32.
<https://doi.org/10.22146/jsp.xxxx>

Laporan dan Dokumen Resmi

Dewan Pers. (2023). Laporan tahunan Dewan Pers 2023: Kebebasan pers di Indonesia. Dewan Pers Republik Indonesia.

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Memetakan lanskap industri media kontemporer di Indonesia

(Edisi Bahasa Indonesia).
CIPG dan HIVOS.

Transparency International.
(2024). Corruption
perceptions index 2023.
Transparency International.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Sumber Digital

KPK Republik Indonesia.
(2024). Statistik
penanganan tindak
pidana korupsi. Komisi
Pemberantasan Korupsi.
<https://www.kpk.go.id/id/statistik>

Nielsen Indonesia. (2022).
Audience measurement:
Television viewership in
Indonesia Q4 2022.
Nielsen Company
Indonesia.